

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adiyanto, Taufiq, 2013, *Konstruksi Hukum Utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta:

Universitas Gadjah Mada Press.

Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:

Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,

Jakarta: PT Rineka Cipta

Azwar, Saifuddi, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT

Citra Aditya Bakti.

Hartono, Sri Rejeki, 2000, *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press.

Hartono, Siti Soemarti, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan*

Kewajiban Pembayaran, Yogyakarta: Bursa Buku.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kuncoro, Mudrajad, 2015, *Menulis Skripsi/Tesis dalam 60 Hari*, Yogyakarta:

UPP STIM YKPN

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:

Liberty

Moleong, Lexy J, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Muljadi, Kartini, 2001, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung:

Penerbit Alumni

Muljadi, Kartini, 2001, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan*

Niaga, Bandung: Penerbit Alumni

Nazir, Mohammad, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia

Shubhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip Norma dan Praktik di*

Peradilan, Jakarta : Kencana

Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami*

Faillissementsverordening Juncto Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 1998

Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-*

Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta : Liberty

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

(Burgerlijk Wetboek)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23
(Wetboek van Koophandel)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 3778)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4443)

MAKALAH DAN JURNAL

Elijana, 1998, *Proses Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Guarantor dan
Holding Company*, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 1997, *Pengaturan Kepailitan di dalam Era Global*,
Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Hukum Kepailitan FH UNDIP,
Semarang.

Simanjuntak, Ricardo, 2005, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*,
Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Tumbuan, Fred BG, 2005, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang
Berkaitan dengan Kepailitan*, Jakarta :Pusat Pengkajian Hukum.

Kailimang, Denny, 1999, *Probematika yang Dihadapi Debitur/Kreditur berkaitan dengan Personal Guarantee atau Corporate Guarantee* Sehubungan dengan Gugatan Kepailitan, Jakarta.

WAWANCARA

Wawancara dengan Dr. Titik Tejaningsih S.H., M.H. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2016

Wawancara dengan Agus Subroto, S.H., M.Hum, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 11 Oktober 2016

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 06 K/N/2005

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst.